



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
**UNIT KERJA** : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I GUSTI NGURAH AGUNG YULIARTA ENDRAWAN
2. Jabatan : ASISTEN KASN
3. NHK : 143647

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 24.300.000.000

1. Tanah Seluas 1125 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 22.000.000.000
2. Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.500.000.000
3. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 800.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 175.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2011, HIBAH TANPA AKTA Rp. 170.000.000
2. MOTOR, KYMCO SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 45.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.270.191.719

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 26.790.191.719

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 26.790.191.719

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.